Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26953-26956

Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Jovin Hutajulu[1], Anggun Lestari[2], Vellin Dwi Afrilia[3],Amin Harahap[4]

[1,2,3,4]Universitas Labuhan Batu

Email: jovinhutajulu30@gmail.com[1] ; anggunlestariee321@gmail.com[2] ; namanyavellin@gmail.com[3] ; aminharahap19@gmail.com[4]

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu hal yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pembangunan daerah. Kondisi ekonomi yang baik dapat mendorong kemajuan suatu daerah, sedangkan kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menghambat proses pembangunan. Tujuan dan fokus penelitian ini yaitu: (1) mengetahui faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi pembangunan daerah, (2) menganalisis dampak ekonomi terhadap perkembangan pembangunan daerah, dan (3) mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui sektor ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif dengan penyajian kualitatif. Tahapan analisis meliputi pengelompokan data, pemeriksaan data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh terhadap pembangunan daerah, terutama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan ekonomi yang efektif dapat membantu mempercepat kemajuan daerah. Adapun upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor ekonomi daerah, serta mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Perekonomian daerah, Pembangunan daerah, Pertumbuhan ekonomi,Kesejahteraan Masyarakat, Infrastruktur daerah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang memberikan dampak besarterhadap pembangunan d aerah. Tindakan korupsi tidak hanya berupa pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan anggaran daerah dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Di Indonesia, kasus korupsi masih sering terjadi dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan dana pembangunan, proyek infrastruktur, bantuan sosial, hingga pelayanan publik. Kondisi ini mengakibatkan banyak program pembangunan daerah tidak berjalan secara maksimal karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru disalahgunakan oleh pihak tertentu. Selain merugikan keuangan daerah, korupsi juga berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Korupsi yang terjadi secara terus-menerus dapat menghambat terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan transparan. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, serta layanan masyarakat lainnya yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi

hal yang sangat penting agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis-sosiologis, dengan menggunakan pendekatan logika hukum yang bersifat induktif-dedukif (Supranto, 2003:3). Untuk memecahkan masalah yang diteliti digunakan kajian socio-legal (Marzuki, 2009:63), yang mengkombinasikan antara kajian yuridis dan kajian sosiologis. Kajian yuridis digunakan untuk memahami perilaku korupsi dari aspek hukum atau perundang-undangan, sedangkan kajian sosiologis digunakan untuk melihat perilaku korupsi itu sebagai fenomana sosial dan ekonomi yang secara nyata berkembang dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.
Data yang diperoleh melalui studi pustaka, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, sedang bahan hukum sekunder berupa buku ilmu hukum dan jurnal bidang ilmu hukum.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni berupa uraian yang mendalam, holistik, dan komprehensif (Moleong, 2002:103). Prosedur analisis melalui tahapan: pengumpulan data, reduksi data (Miles, 1992:16), paparan dan analisis data, dan berakhir dengan simpulan (Rahayu, 2009:52). Apabila dibuat urutan sederhana, analisis data tersebut mencakup empat kegiatan, yakni: kategorisasi data, verifikasi data, interpretasi data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Korupsi terhadap Perekonomian dan Kehidupan Sosial Masyarakat Korupsi memberikan dampak yang sangat merusak terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Berikut adalah uraian lengkapnya:

A. Dampak terhadap Perekonomian Korupsi menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan melemahkan struktur ekonomi nasional.

Beberapa dampak ekonomi yang paling signifikan antara lain:

Penghambat Investasi Asing dan Domestik: Investor, baik lokal maupun asing, cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena dianggap berisiko tinggi. Biaya-biaya tersembunyi seperti suap dan pungli memperbesar modal usaha dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Meningkatkan Biaya Ekonomi: Korupsi menyebabkan pembengkakan anggaran proyek (mark-up) dan penyelewengan dana publik. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru masuk ke kantong pribadi pejabat yang korup. Hal ini mengakibatkan proyek infrastruktur atau layanan publik tidak maksimal dan merugikan rakyat.

Merusak Iklim Usaha dan Persaingan Sehat: Perusahaan yang tidak memberikan suap akan kalah bersaing dengan yang menyuap, meskipun dari segi kualitas lebih baik. Ini menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan mematikan semangat wirausaha jujur.

Menurunkan Pendapatan Negara: Korupsi di sektor perpajakan, bea cukai, dan pengadaan barang/jasa menyebabkan kebocoran penerimaan negara. Pendapatan negara menjadi tidak optimal, sehingga pembangunan dan pelayanan publik terhambat.

B. Memperluas Ketimpangan Ekonomi:

Korupsi membuat kekayaan hanya berputar di kalangan elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Ini memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta memperkuat oligarki ekonomi. Dampak terhadap Kehidupan Sosial Selain ekonomi, korupsi berdampak besar terhadap tatanan sosial dalam masyarakat:

Erosi Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik merusak kredibilitas institusi negara. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat hukum, pemerintah, bahkan sistem demokrasi itu sendiri.

Pembentukan Budaya Apatis dan Sinis: Ketika korupsi dianggap biasa dan tidak ada keadilan dalam penegakan hukum, masyarakat cenderung menjadi apatis, tidak peduli, atau bahkan ikut-ikutan melakukan praktik curang.

Ketimpangan Akses terhadap Layanan Publik: Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Masyarakat miskin dan rentan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak karena akses mereka terbatas oleh birokrasi yang korup.

Degradasi Nilai Sosial dan Moral: Dalam masyarakat yang terbiasa melihat korupsi, nilai nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlahan-lahan memudar. Generasi muda bisa tumbuh dengan persepsi bahwa sukses hanya bisa diraih melalui jalan pintas dan koneksi.

2. Mengapa Korupsi Tetap Marak Meskipun Upaya Pemberantasannya Telah Dilakukan Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, termasuk dalam sektor ekonomi. Praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga menciptakan distorsi dalam alokasi sumber daya, menghambat investasi, dan menurunkan efisiensi ekonomi. Ketika integritas moral aparatur negara melemah, keputusan-keputusan ekonomi yang seharusnya didasarkan pada prinsip kepentingan publik berubah menjadi sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim usaha, menurunkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus diiringi dengan penguatan integritas moral aparatur negara sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. 13 Banyak negara, termasuk Indonesia, telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Namun, praktik ini masih terus berkembang. Penyebab utamanya antara lain:

a. Penegakan Hukum yang Lemah Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tebang pilih membuat pelaku korupsi tidak merasa takut. Hukuman yang ringan, vonis yang tidak menimbulkan efek jera, serta intervensi politik dalam proses hukum menjadi penghambat utama pemberantasan korupsi.
b. Kurangnya Integritas Aparat Tidak sedikit aparat penegak hukum dan pengawas pemerintahan yang justru terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana pengawas dan yang diawasi sama-sama korup.
c. Budaya Koruptif yang Mengakar Korupsi sudah menjadi kebiasaan di berbagai sektor dan tingkatan, dari elit hingga birokrat bawah. Praktik seperti pungutan liar, gratifikasi, atau nepotisme sering dianggap hal biasa, bahkan sudah menjadi budaya yang diwariskan.
d. Kontrol Sosial yang Lemah Masyarakat belum sepenuhnya kritis terhadap korupsi. Banyak kasus yang tidak terungkap karena tidak ada keberanian untuk melapor, takut akan ancaman, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti.
e. Celah dalam Sistem Pemerintahan dan Birokrasi Sistem yang tidak transparan dan terlalu birokratis membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang. Kurangnya digitalisasi dan keterbukaan data membuat korupsi sulit dilacak.

3. Tantangan dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Masyarakat Membangun budaya antikorupsi bukanlah tugas mudah karena harus mengubah pola pikir, kebiasaan, dan nilainilai sosial yang telah terbentuk lama. Beberapa tantangannya antara lain:

a. Kurangnya Pendidikan Karakter Sejak Dini Pendidikan antikorupsi masih belum menjadi bagian utama dari sistem pendidikan formal. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas belum diajarkan secara konsisten dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
b. Minimnya Keteladanan dari Pemimpin Pemimpin yang seharusnya menjadi contoh justru sering terlibat dalam kasus korupsi. Ketika pejabat tinggi tidak menunjukkan integritas, masyarakat pun enggan untuk mengikuti nilai-nilai antikorupsi.
c. Ketidak percayaan terhadap Sistem Masyarakat sering kali skeptis terhadap program antikorupsi karena tidak melihat hasil nyata. Ini menyebabkan partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan korupsi menjadi rendah.
d. Media dan Sosial Media yang Tidak Edukatif Alih-alih mengedukasi, banyak media yang justru menyajikan konten sensasional atau tidak mendidik. Konten yang menormalisasi gaya hidup mewah tanpa menjelaskan sumber kekayaannya dapat mendorong mentalitas instan dan konsumtif.

e. Kurangnya Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower) Orang yang melaporkan korupsi sering mendapatkan ancaman atau intimidasi. Tanpa sistem perlindungan yang kuat, orang akan takut untuk melapor atau bersikap kritis.

KESIMPULAN

Kurangnya integritas dari para pejabat daerah menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan daerah. Pemimpin yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat justru sering terlibat dalam tindakan korupsi. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin menurun dan nilai-nilai kejujuran menjadi sulit diterapkan.

Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga memengaruhi jalannya pembangunan daerah. Banyak masyarakat merasa ragu terhadap upaya pemberantasan korupsi karena masih sering terjadi penyalahgunaan anggaran dan jabatan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan menjadi kurang maksimal.

Media dan sosial media yang kurang memberikan edukasi positif juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat. Tayangan yang menampilkan gaya hidup mewah tanpa proses yang jelas dapat mendorong munculnya perilaku konsumtif dan keinginan mendapatkan hasil secara instan. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memicu tindakan korupsi yang berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah.

Kurangnya perlindungan bagi pelapor tindak korupsi juga menjadi tantangan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Banyak masyarakat takut melaporkan tindakan korupsi karena khawatir mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui penegakan hukum, pendidikan antikorupsi, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

.

REFERENCES

(imamlamijan@gmail.com) mohamadtohari.undaris@gmail.com)

Zainudin Hasan, Sol Justicia 5 (2), 192, 2022. Tinjauan Kriminalogi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitas Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara.

Zainudin, Hasan.2025. Pendidikan Anti Korupsi.Universitas Bandar Lampung : Lampung

Adnan, Zainal. 2006. Korupsi dan Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Atmasasmita, Romli. 2004. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Bandung: Mandar

Dananto, Teguh. 2011."Gelapnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Makalah Diskusi Bareng Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011.

Hikmahanto, Juwana. 2006. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia". Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.

Hikmahanto, Juwana. 2006. "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia". Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.